

ANALISA FRAMING PEMBERITAAN JOKOWI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERKAIT REVISI UNDANG - UNDANG KPK DALAM MEDIA BERITA ONLINE TEMPO.CO

Roos Yulastina¹
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep
yulastina07@gmail.com

Mohammad Bagus Kurniawan²
Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian

Abstrak

Framing secara umum dapat dipahami sebagai metode untuk melihat bagaimana sebuah media bercerita (*story telling*) atas sebuah peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” realitas yang dijadikan berita. Analisis Framing dalam kasus pemberitaan Jokowi terkait revisi UU KPK, menggunakan teori framing model Gamson & Modigliani dimana analisis framing indikator analisis *framing devices*, *Metaphors*, *Exemplar*, *Catchphrases*, *Depictions*, *Visual Images*, *Reasoning device*, *Roots* dan *Appeal to principle*.

Hasil analisis pada kasus ini, menunjukkan bahwa media massa khususnya media massa online tempo.co menggambarkan dan mendeskripsikan kritikan keras terhadap kebijakan Jokowi yang tidak merevisi UU KPK meskipun gejolak masa dan penolakan masyarakat terhadap peraturan kelembagaan yang dianggap melemahkan peran KPK dalam memberantas korupsi. Permasalahan ini yang kemudian diangkat dan dijadikan topik hangat sebagai bentuk kritik dan protes kepada Jokowi selaku presiden RI dalam menanggapi permasalahan perubahan UU revisi KPK.

Kata Kunci: Analisis framing, Jokowi dan Tempo.co

1. PENDAHULUAN

Dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani, frame dipandang sebagai cara bercerita atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Gamson melihat wacana media (khususnya berita) terdiri atas sejumlah kemasan (*package*) melalui konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. Kemasan itu merupakan skema atau struktur pemahaman yang dipakai oleh seseorang ketika mengkonstruksikan pesan-pesan yang dia sampaikan dan menafsirkan pesan yang dia terima. Selain itu, framing secara umum

dapat dipahami sebagai metode untuk melihat bagaimana sebuah media bercerita (*story telling*) atas sebuah peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” realitas yang dijadikan berita. Ada dua perangkat bagaimana ide-ide tersebut dapat diterjemahkan dalam teks berita yaitu :

1. *Framing Device* (perangkat framing), yaitu perangkat yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar dan metafora tertentu.

2. *Reasoning Device* (perangkat penalaran) yaitu sebuah gagasan tidak hanya berisi kata atau kalimat, gagasan itu juga selalu ditandai oleh dasar pembenar tertentu, alasan tertentu dan sebagainya. Dasar pembenaran dan penalaran tersebut bukan hanya meneguhkan suatu gagasan atau pandangan, melainkan lebih jauh membuat pendapat atau gagasan tampak benar, absah dan demikian adanya. Lewat aspek penalaran tersebut, khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak sebagai kebenaran, alamiah dan wajar. Sebaliknya, kalau dalam suatu teks tidak terdapat elemen penalaran demikian, gagasan akan tampak aneh, tidak beralasan dan orang dengan mudah mempertanyakan pesan atau gagasan tersebut.

Gamson mendefinisikan *Core Frame* sebagai organisasi gagasan sentral atau alur cerita yang mengarahkan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu. Frame merupakan inti sebuah unit besar wacana publik yang disebut *package*

Struktur Dalam Framing Model Gamson & Modigliani Media Package	
Core Frame	
Condensing Symbols	
FRAMING DEVICES (Perangkat Framing)	REASONING DEVICES (Perangkat Penalaran)
Metaphors (Perumpamaan /pengandaian atau kata yang bukan sebenarnya)	Roots (Hubungan Sebab-Akibat dari pemberitaan)
Exemplar (Kasus-kasus yang banyak diekspos media atau yang dijadikan pelajaran)	Appeal to Principle (Penggambaran prinsip, pemikiran dan sikap deskriptif)
Catchphrases (Frase yang menarik, menggunakan konotasi tertentu seperti jargon-jargon, slogan pemeo dan semboyan)	
Depictions (Penggambaran suatu obyek, isu, peristiwa dan fakta atau orang yang bersifat konotatif)	
Visual Images (Gambaran yang diberikan berupa foto, lukisan atau rangkaian dari kata-kata/polisemi yang melukiskan sesuatu)	

2. PEMBAHASAN ANALISIS FRAMING

A. MEDIA PACKAGE

Media Online tempo.co (<https://www.tempo.co>) dalam fokus beritanya sekitar belasan kali mengangkat berita terkait “Sikap” Jokowi terhadap Revisi Undang-undang KPK, yang dimuat tempo.co sekitar tanggal 9 September 2019 sampai dengan 19 September 2019.

B. CORE FRAME

TEMPO.CO

The screenshot shows the TEMPO.CO website interface. At the top, there is a navigation menu with categories like NASIONAL, BISNIS, METRO, etc. Below the navigation is a search bar containing the text 'jokowi revisi uu kpk'. The search results show two main articles. The first article is titled 'Pakar Hukum Sebut Sikap Jokowi Soal Revisi UU KPK Menyesatkan' and includes a small image of a person. The second article is titled 'Analisa Fahri Hamzah Mengenai Sikap Jokowi dan Revisi UU KPK ...' and also includes a small image. On the right side of the search results, there is a 'TERPOPULER' section with a list of six trending articles, each with a numbered icon and a brief title.

C. CONDENSING SYMBOLS

1. Framing Devices:

1). Metaphors

Perumpamaan, pengandaian atau kata yang mengandung kata bukan sebenarnya. Dalam berita tempo.co yang dimuat pada hari selasa tanggal 15 September 2019, dengan headline “Revisi UU KPK, Bola di Tangan Tuan Presiden”, jika di analisis menggunakan analisis framing dari aspek Metaphor atau penggunaan perumpamaan dapat diketahui jika pihak tempo ingin menyampaikan pesan dengan menggunakan kata perumpamaan “bola di tangan tuan presiden” bahwa presiden Jokowi terkait Revisi UU KPK seolah-olah presiden lah pemegang kekuasaan “penuh” saat ini untuk

Elemen inti media online tempo.co adalah terkait Revisi Undang-Undang KPK yang menimbulkan pro dan kontra mulai dari Internal KPK, Eksekutif maupaun Legislatif, dalam tulisan ini penulis mencoba menganalisis framing menggunakan model Gamson dan Modigliani dengan fokus pemberitaan terkait Presiden Jokowi terhadap Revisi UU KPK.

URL: <https://www.tempo.co/search?q=jokowi+revisi+uu+kpk#gsc.tab=0&gsc.q=jokowi%20revisi%20u%20kpk&gsc.page=3>

jadi atau tidaknya UU KPK direvisi walaupun pada saat berita di muat belum ada pengesahan dari Legislatif, pengambil keputusan tentang pelaksanaan Revisi UU KPK.

URL: <https://fokus.tempo.co/read/1248420/revisi-uu-kpk-bola-di-tangan-tuan-presiden>.

Iklan ditutup oleh Google

HOME > FOKUS > FOKUS

Revisi UU KPK, Bola di Tangan Tuan Presiden

Reporter: Shinta Maharani (Kontributor)
Editor: Endri Kurniawati

Senin, 16 September 2019 13:37 WIB

0 KOMENTAR



TERPOPULER

- 1 Demo Mahasiswa, Kecewa Berujung Parlemen Jalanan



Majalah Tempo juga sempat membuat cover majalah tempo dengan gaya mengkritik sikap Jokowi yang dianggap “ingkar janji”. Dengan menggunakan topik utama managih



janji presiden degan perumpamaan kata “Janji Tinggal Janji”, yang menyiratkan terkait “janji” politik saat Presiden Jokowi melakukan kampanyenya terhadap pemberantasan korupsi.

0 KOMENTAR Font: Roboto Ukuran Font: 12

“Menurut saya sih masih dalam batas wajar. Masih oke. Tak ada sama sekali penghinaan. Justru seharusnya direspons baik,” kata Ade saat dihubungi Tempo, Selasa, 17 September 2019.

Sampul bergambar Presiden Jokowi yang memiliki bayangan berhidung panjang sempat memunculkan wacana dilaporkan ke Kepolisian sebagai bentuk penghinaan kepada presiden.

Menurut Ade, bagi LBH Pers cover itu produk jurnalistik yang wajar. Saat ini, Jokowi memang sedang menuai banyak sorotan terhadap sikapnya yang menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sikap Jokowi tersebut dinilai tak konsisten dengan janjinya yang ingin menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai revisi UU KPK yang diusulkan DPR itu untuk melemahkan KPK.

“Dalam bayangan saya, Tempo menangkap fenomena itu dan ditafsirkan dalam bentuk gambar yang ada di cover itu, yang pinokio itu. Dalam konteks demokrasi itu sangat wajar,” tutur Ade.

Dia mengingatkan masyarakat bahwa Jokowi merupakan Presiden yang dipilih rakyat dan bukan

2). Catchphrases



HOME > NASIONAL > HUKUM

Jokowi Dianggap Main-main Janji Pemberantasan Korupsi

Reporter: Fikri Arigi
Editor: Jobpie Sugiharto

Selasa, 17 September 2019 12:15 WIB

0 KOMENTAR



TERPOPULER

- 1 Jokowi Perintahkan Tunda Pengesahan RUU KUHP
- 2 Revisi UU PAS, Napi Boleh Cuti dan Jalan-jalan ke Mal
- 3 Veronica Koman Jadi Buronan Polisi Sedunia
- 4 Jokowi Minta Tunda RKUHP

Tempo.co edisi ; Selasa, 17 September 2019

Catchphrases adalah Frase yang menonjolkan Konotasi tertentu. Dalam hal ini adalah frase khas yang merujuk pemikiran tertentu. Wujud jargon-jargon, slogan pemeo dan semboyan. Ketidak tegasan presiden dalam revisi UU KPK jika diungkapkan kembali dalam berita edisi 17 September dengan judul “Jokowi Dianggap Main – Main Janji Pemberantasan Korupsi”, perumpamaan ”Main – Main” dalam hal ini

menunjukkan jika redaksi ingin menyampaikan bahwa ketidak seriusan atau ketidak konsistenan pak Presiden terhadap janjinya sendiri. Dalam isi berita juga dapat dilihat pada Alinea ke empat yang memuat komentar Ketua YLBHI yaitu : “Asfinawati menuding Presiden Jokowi telah membohongi publik karena terlibat dalam pelemahan KPK dengan membahas revisi UU KPK”.



HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM

0 KOMENTAR Font: Roboto Ukuran Font: - +

Surpres itu berisi persetujuan membanas berikut menteri yang diminta membanas bersama DPR.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Jokowi tidak main-main dengan janjinya memberantas korupsi.

Ketua Umum YLBHI Asfinawati menuding Presiden Jokowi telah membohongi publik karena terlibat dalam pelemahan KPK dengan membahas revisi UU KPK.

Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi pernah berjanji tak akan kompromi dengan pemberantasan korupsi. Bahkan menyebut korupsi sebagai musuh bersama.

"Mandat rakyat yang telah diperoleh, salah satunya melalui kampanye keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi," ucap Asfinawati.

URL: <https://nasional.tempo.co/read/1248808/jokowi-dianggap-main-main-janji-pemberantasan-korupsi/full&view=ok>

3). Exemplars



fokus.tempo.co/read/1248420/revisi-uu-kpk-bola-di-tangan-tuan-presiden

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM

0 KOMENTAR Font: Roboto Ukuran Font: - +



Ketua KPK, Agus Rahardjo (tengah), bersama dua wakil ketua KPK, Saut Situmorang (kiri) dan Laode M. Syarief (kanan) memberikan keterangan terkait penyerahan mandat pimpinan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat malam, 13 September 2019. Penyerahan mandat ini terkait dinamika pembahasan revisi Undang - Undang KPK yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR. TEMPO/Imam Sukanto

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sebanyak 100 dosen dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari berbagai fakultas menyatakan kekecewaannya terhadap ketidaktegasan Presiden Joko Widodo menghadapi pelemahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK.

Exemplars yang dimaksud adalah Kasus-kasus yang banyak diekspos media atau yang dijadikan pelajaran, salah satunya adalah media online Tempo.co yang secara kontinyu menayangkan berita – berita terkini terkait kasus Revisi UU KPK. Sebagaimana yang dimuat dalam media

online Tempo.co dalam edisi 13 September 2019. Dimana ada kejadian Ketua KPK, Agus Rahardjo, bersama dua wakil ketua KPK, Saut Situmorang dan Laode M. Syarief memberikan penyerahan mandate pimpinan di gedung Komisi Pemberantasan

Korupsi, di Jakarta, pada Jumat malam tanggal 13 September 2019.

Kejadian ini yang kemudian menimbulkan pemberitaan negatif terhadap presiden Jokowi, karena Presiden dianggap menggantung atau tidak tegas untuk menolak revisi UU KPK, atau dengan kata lain media Tempo.co mulai gencar mengkritik Jokowi karena dianggap tidak menepati janji untuk memberantas korupsi.

4). Depiction

Penggambaran suatu obyek, isu, peristiwa dan fakta atau orang yang bersifat



cekfakta.tempo.co/fakta/400/fakta-atau-hoaks-benarkah-cover-majalah-tempo-edisi-16-septembe

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLC

Majalah Tempo tidak pernah menerbitkan edisi "Saya Tetap Percaya Presiden" sebagaimana yang beredar di media sosial untuk menggantikan edisi "Janji Tinggal Janji". Dalam laman resmi [Majalah Tempo](#), edisi terakhir yang diterbitkan adalah edisi "Janji Tinggal Janji".

Menurut Pemimpin Redaksi Tempo.co, Wahyu Dhyatmika, secara gramatikal, judul "Saya Masih Percaya Presiden" itu salah. "Saya di sana mewakili siapa? Redaksi Tempo? Narasumber?" kata Wahyu. Dia menegaskan Tempo tidak mungkin melakukan kesalahan elementer seperti itu.

Dikutip dari situs Tempo.co, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo, Setri Yasra, juga mengatakan bahwa sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 bukan menggambarkan Presiden Joko Widodo sebagai pinokio. "Tempo tidak pernah menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan. Tempo tidak menggambarkan Presiden sebagai pinokio. Yang tergambar adalah bayangan pinokio," kata Setri.

Setri menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Majalah Tempo memberikan perhatian terhadap dinamika dalam masyarakat perihal revisi UU KPK.

la mengatakan, sampul Majalah Tempo dengan judul "Janji Tinggal Janji" itu merupakan metafora atas dinamika tersebut, yaitu tuduhan sejumlah pegiat antikorupsi bahwa Presiden ingkar janji dalam penguatan KPK. "Tempo telah memuat penilaian Presiden dalam bentuk wawancara"



Penggunaan gambar bayangan hidung panjang menyerupai tokoh Pinokio, "Tidak Menghina", merupakan topik utama Tempo.co pasca kasus pelimpahan mandat wewenang KPK ke pada Presiden. Menurut Redaktur Eksekutif Majalah Tempo, Setri Yasra, menurutnya sampul majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 bukan menggambarkan Presiden Joko Widodo sebagai Pinokio, yang tergambar melainkan bayangan Pinokio menurut Senti. Jika di analisis lebih jauh, tentu saja penggunaan

konotatif. Adanya penggunaan kata khusus untuk membangkitkan prasangka yang menyesatkan. Dalam hal ini terkait kasus pemberitaan revisi UU KPK, framing berita Tempo.co lebih mengarahkan pada kritik terhadap presiden Jokowi selaku kepala negara yang tidak bisa mengambil sikap tegas. Hal ini dapat dilihat dari tulisan – tulisan di media Tempo.co yang beberapa hari terakhir menggambarkan sosok presiden Jokowi yang menurut pemberitaan Tempo.co tidak konsisten perihal janji penguatan KPK dengan sikap presiden yang tidak mencaput Surpres (Surat Presiden) terkait Revisi UU KPK.

gambar dan kata – kata "Janji Tinggal Janji" tersebut menyiratkan prasangka negatif bagi publik yang membaca berita tersebut. Karena dalam persepsi publik pertama kali yang di ingat atau dipahami dari judul tersebut adalah antara tindakan dan janji yang di berikan Jokowi terbukti tidak sesuai, dan dipertegas melalui konotasi bayangan tokoh fiksi "Pinokio" yang apabila berbohong akan bertambah panjang hidungnya.

5). Visual Image



Pada perseptif ini, analisis framing dari pemberitaan media online Tempo.co secara visual mempertegas gambaran secara keseluruhan kasus Revisi UU KPK yang telah disteujui oleh DPR beserta pemerintah RI yang diwakilkan oleh figur presiden Jokowi. Penggunaan desain visual gambar Jokowi beserta bayangan Pinokio menunjukkan bahwa ketegasan penulis berita ingin meyakinkan baik secara kata dan gambar bahwa kasus ini menunjukkan

siapa sebetulnya Jokowi melalui bayangan Pinokio yang berhidung panjang ketika berbohong.

2. Reasoning Devices:

1). Roots

Roots adalah analisis kausal yang biasanya adalah sebuah unsur sebab akibat. Dalam berita online Tempo.co juga menampilkan roots sebagai berikut :

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM

0 KOMENTAR Font: Roboto Ukuran Font: - +

Pengalaman Baru.

Pesan di Traveloka, rekan terpercaya PT. KAI. Pesan slotnya sekarang

Menurut Ade, bagi LBH Pers cover itu produk jurnalistik yang wajar. Saat ini, Jokowi memang sedang menuai banyak sorotan terhadap sikapnya yang menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sikap Jokowi tersebut dinilai tak konsisten dengan janjinya yang ingin menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai revisi UU KPK yang diusulkan DPR itu untuk melemahkan KPK.

"Dalam bayangan saya, Tempo menangkap fenomena itu dan ditafsirkan dalam bentuk gambar yang ada di cover itu, yang pinokio itu. Dalam konteks demokrasi itu sangat wajar," tutur Ade.

Dia mengingatkan masyarakat bahwa Jokowi merupakan Presiden yang dipilih rakyat dan bukan putra raja di negara berbasis kerajaan. Artinya, Jokowi sebagai pemimpin memang seharusnya tak kebal dari kritik.

Ade justru kemudian menyatakan kejadian seperti ini akan banyak terjadi di masa depan jika revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selesai dilakukan.

Dalam revisi itu terdapat poin yang menyebut tentang penghinaan kepada presiden.

Yang dalam berita tersebut menampilkan statement LBH Pers Cover yang menyatakan pemberitaan tentang Presiden Jokowi dalam terkait revisi UU KPK terkait sikap Jokowi yang dinilai tidak konsisten dengan janjinya yang ingin menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Gambar dalam cover majalah

tempo berbentuk bayangan Pinokio merupakan hal yang wajar dalam konteks demokrasi, dimana ditafsirkan sebagai bentuk kritik. URL : <https://nasional.tempo.co/read/1248818/lbh-pers-cover-majalah-tempo-tidak-menghina-jokowi/full&view=ok>

2). Appeal To Principle

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM

0 KOMENTAR

Font: Roboto Ukuran Font: - +

pemberantasan korupsi. Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai revisi UU KPK yang diusulkan DPR itu untuk melemahkan KPK.

"Dalam bayangan saya, Tempo menangkap fenomena itu dan ditafsirkan dalam bentuk gambar yang ada di cover itu, yang pinokio itu. Dalam konteks demokrasi itu sangat wajar," tutur Ade.

Dia mengingatkan masyarakat bahwa **Jokowi merupakan Presiden yang dipilih rakyat dan bukan putra raja di negara berbasis kerajaan. Artinya, Jokowi sebagai pemimpin memang seharusnya tak kebal dari kritik.**

Ade justru kemudian menyatakan kejadian seperti ini akan banyak terjadi di masa depan jika revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selesai dilakukan.

Dalam revisi itu terdapat poin yang menyebutkan tentang penghinaan kepada presiden.

"Nanti kalau Rancangan Undang-Undang KUHP disahkan, perdebatannya akan sangat mirip sekali seperti ini. Akan lebih banyak kasus seperti ini, ini menghina, ini mengkritik. Artinya ini sangat multi tafsir."

Majalah Tempo edisi 16 September 2019 menuai kontroversi. Kelompok pendukung Jokowi yakni Jokowi Mania (JokMa) mendatangi Dewan Pers untuk melaporkan cover ini. Namun pertemuan berakhir dengan sebatas konsultasi.

Appeals to Principle adalah premis dasar atau klaim-klaim moral seperti dalam pemberitaan, dalam pemberitaan di atas (masih sama pada tangkapan gambar roots) juga terdapat Appeals to Principle yang dimuat dalam frase kata-kata pendapat Direktur Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudi yang mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa Presiden Jokowi merupakan hasil dari pilihan rakyat dan bukan putra raja pada negara yang berbasis kerajaan, yang mana seharusnya pemimpin negara berdemokrasi tidak kebal dari kritik.

terkait pemberantasan korupsi dan rencana merevisi UU KPK yang kemudian dikaitkan dengan janji politik kampanye Jokowi. Pada dasarnya media massa ataupun media online memiliki kekuatan dalam mempengaruhi atau menggiring opini publik yang menerima informasi tersebut. Hal yang harus di perhatikan adalah kemampuan audiens atau orang yang menerima informasi harus selektif dan bijak dalam memilih informasi yang diberitakan melalui media massa khususnya media online.

3. Kesimpulan

Teknologi dan perkembangan internet seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, satu sisi kecanggihan teknologi dan kemudahan mengakses internet memberikan dampak positif, namun di sisi lain juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah, masyarakat yang dapat mengakses berita dan informasi secara bebas melalui gadget dan jaringan internet, namun terkadang tidak diimbangi dengan kemampuan berfikir kritis dan bijak dalam menyaring informasi yang diterima.

Dalam kasus ini, berdasarkan analisis framing pemberitaan Jokowi

DAFTAR PUSTAKA

Tempo.co. Jokowi Revisi Undang –Undang
KPK: Media Online:
<https://www.tempo.co/search?q=jokowi+revisi+uu+kpk#gsc.tab=0&gsc.q=jokowi%20revisi%20u%20u%20kpk&gsc.sort=>

Tempo.co. Revisi UU KPK, Bola ditangan
Presiden. Media Online:
<https://fokus.tempo.co/read/1248420/revisi-uu-kpk-bola-di-tangan-tuan-presiden>

Tempo.co. Jokowi dianggap main – main
berantas korupsi. Media online:
<https://nasional.tempo.co/read/1248808/jokowi-dianggap-main-main-janji-pemberantasan-korupsi/full&view=ok>

Tempo.co. Majalah Tempo tidak Hina
Jokowi
<https://nasional.tempo.co/read/1248818/lbhpers-cover-majalah-tempo-tidak-menghina-jokowi/full&view=ok>